



Available online at: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JLC>

LEARNING COMMUNITY

Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 8 (1), 2024, 1-6

Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Sebagai Upaya Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Ponorogo

Nadhin Nazhela Putri*, Arief Tukiman Hendrawijaya, Fuad Hasan

Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Jember. Jl. Kalimantan No. 37, Tegal Boto, Jember 62811, Indonesia

* Korespondensi Penulis. Email: nadhinnazhela@gmail.com

Received: 03 Januari 2024, Revised: 25 Februari 2024 Accepted: 2 Maret 2024

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting sebagai upaya pembangunan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pemerolehan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari 2 orang penyuluh KB, Kepala Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Kepala BKB, dan TPK. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi yang terdiri dari triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Kemudian pada teknik analisis data menggunakan analisis model Miles & Huberman meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan kesimpulan. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Lembaga Balai Penyuluhan KB sebagai upaya pembangunan kesehatan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi berupa promosi kesehatan dan pelatihan aplikasi ELSIMIL guna mencegah risiko stunting.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Stunting, Pembangunan Kesehatan, Masyarakat.

Implementing a Policy to Accelerate Stunting Reduction as a Public Health Development Effort in Ponorogo Regency

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of the policy to accelerate stunting reduction as an effort to develop public health carried out by the Family Planning Counseling Center in Sooko District, Ponorogo Regency. This study uses a descriptive qualitative approach through data collection in the form of interviews, observations, and documentation. Determination of informants using purposive sampling technique consisting of 2 family planning instructors, Head of Family Welfare and Resilience, Head of BKB, and TPK. The validity of the data in this study used extended observations, increased persistence, and triangulation consisting of triangulation of sources, techniques, and time. Then the data analysis technique using the Miles & Huberman model analysis includes collection, reduction, data presentation, and conclusions. Furthermore, the results of the study indicate that the implementation of the policy to accelerate stunting reduction is carried out by the Family Planning Counseling Center as an effort to develop public health through outreach activities in the form of health promotion and training on the ELSIMIL application to prevent the risk of stunting.

Keywords: Policy Implementation, Stunting, Health Development, Community

PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu isu permasalahan kesehatan yang terjadi secara krusial di wilayah Indonesia. Stunting berdampak pada penurunan sistem metabolisme tubuh serta pertumbuhan fisik dan kognitif pada anak sampai lanjut usia. Sejalan dengan hal tersebut (Yuliana dan Hakim, 2019, p.1) menjelaskan bahwa adanya stunting mengakibatkan penurunan sistem pertumbuhan fisik, kecerdasan, sertaproduktivitas di masa depan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa adanya stunting mengakibatkan penurunan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan sehingga diperlukan sebuah tindakan untuk menanggulangnya. Tindakan tersebut sudah tertuang dalam kebijakan yang dijadikan landasan bagi lembaga terkait untuk diimplementasikan sebagai upaya pembangunan kesehatan agar terhindar dari risiko stunting. Kebijakan yang digunakan ialah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kebijakan ini berisi tentang Strategi Nasional Pecepatan Penurunan Stunting yang termuat dalam Bab 2 Pasal 2 Ayat 1 dan Rencana Aksi Nasional dalam Bab 2 Pasal 8 Ayat 1.

Kecamatan Sooko merupakan salah satu daerah di Kabupaten Ponorogo yang berisiko stunting karena mengalami kenaikan sebanyak 0,86% di tahun 2022. Hal ini terjadi karena pada masa pandemi COVID 19 terdapat krisis ekonomi yang mengakibatkan krisis kesehatan sehingga berisiko stunting. Selain hal tersebut, Kecamatan Sooko juga menjadi salah satu wilayah dengan lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi yang dilakukan oleh lembaga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo. Kurangnya edukasi terkait stunting juga menjadi salah satu faktor meningkatnya potensi stunting di wilayah Kecamatan Sooko. Secara garis besar adanya permasalahan stunting di wilayah Kecamatan Sooko mengakibatkan penurunan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan sehingga diperlukan tindakan untuk menanggulangnya sebagai upaya pembangunan kesehatan agar terciptanya pemberdayaan dalam bidang kesehatan itu sendiri.

Kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut maka seluruh lembaga atau organisasi di wilayah Kecamatan Sooko yang memiliki wewenang untuk meningkatkan taraf pembangunan kesehatan dalam proses penurunan stunting dapat melakukan tindakan melalui implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting yang telah ditetapkan oleh presiden Republik Indonesia. Salah satu lembaga yang memiliki wewenang untuk mengimplmentasikan kebijakan tersebut ialah Balai Penyuluhan KB di wilayah Kecamatan Sooko. Lembaga tersebut berperan dalam memberikan KIE (Komunikasi, Edukasi, dan Informasi) tentang stunting sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya pembangunan kesehatan dalam masyarakat. Peran Balai Penyuluhan KB dalam mengatasi permasalahan stunting sangat penting, hal ini dikarenakan keberadaannya menjadi ujung tombak dalam proses implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting yang dapat berinteraksi secara langsung kepada masyarakat melalui pendekatan keluarga (Dwinandia, M. M., & Hilmi, M. I. (2022).

Berdasarkan permasalahan yang telah terurai sebagai berikut maka peneliti menyusun penelitian tentang implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting sebagai upaya pembangunan kesehatan dalam masyarakat yang dilakukan oleh lembaga Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Sooko. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pembangunan kesehatan melalui implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh lembaga Balai Penyuluhan KB demi terciptanya derajat kesehatan masyarakat yang sempurna sehingga dapat mewujudkan tingkat keberdayaan kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Sooko akibat risiko stunting.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan salah satu prosedur yang digunakan dalam penelitian, dimana hasil yang diperoleh berupa data deskriptif dalam bentuk ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang diamati dalam suatu

konteks kajian dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik Bodgan & Taylor 1975, Bodgan & Biklen 2007 dalam Hamzah (2019). Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah untuk mengetahui informasi secara langsung dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik mengenai implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting sebagai upaya pembangunan kesehatan masyarakat di Kecamatan Sooko.

Penentuan tempat penelitian yang digunakan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling area*. Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa *purposive sampling area* merupakan teknik yang digunakan dalam menetapkan sampel wilayah dengan cara memilih sampel dari berbagai populasi wilayah yang ada sesuai dengan kebutuhan, dalam teknik ini pemilihan sampel yang digunakan dapat mewakili berbagai macam karakteristik populasi yang ada sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti mengambil fokus tempat penelitian di wilayah Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, dengan pertimbangan adanya kenaikan prevalensi stunting sebanyak 0,86% pada tahun 2022, wilayah Kecamatan Sooko menjadi lokasi fokus intervensi stunting terintegrasi, kurangnya edukasi masyarakat terkait stunting, serta adanya penurunan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan akibat stunting.

Waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebanyak 7 bulan terhitung dari 2 bulan pertama proses persiapan penelitian dan pengerjaan proposal, 2 bulan selanjutnya proses penelitian di lapang, dan tiga bulan selanjutnya proses pengerjaan laporan penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2019) menyebutkan *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan dalam penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu informan kunci terdiri dari 2 orang penyuluh yang terdapat di lembaga Balai Penyuluhan KB. Selanjutnya informan pendukung terdiri dari Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kepala Bina Keluarga Balita yang terdapat di lembaga Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo serta perwakilan Tim Pendamping Keluarga (TPK) desa di wilayah Kecamatan Sooko.

Selanjutnya dalam teknik pemerolehan data peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur guna menggali data informasi sesuai dengan kajian yang diteliti. Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan 2 penyuluh KB selaku informan kunci serta informan pendukung yang terdiri dari Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Kepala Bina Keluarga Balita yang terdapat di lembaga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kemudian perwakilan Tim Pendamping Keluarga (TPK) desa di wilayah Kecamatan Sooko. Selanjutnya peneliti juga menggunakan teknik observasi partisipasi pasif guna menggali informasi data di lapang tentang tindakan yang dilakukan lembaga Balai Penyuluhan KB dalam melakukan implementasi kebijakan sebagai upaya pembangunan kesehatan masyarakat. Kemudian dalam pemerolehan data peneliti juga menggunakan dokumentasi guna memperoleh data tentang profil lembaga Balai Penyuluhan KB, data prevalensi stunting di Kecamatan Sooko, serta adanya dokumentasi dari lembaga tersebut dalam kegiatan implementasi kebijakan yang dilakukan.

Terkait keabsahan data peneliti menggunakan teknik perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi yang terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Kemudian dalam menganalisis data peneliti menggunakan teori Miles dan Huberman yang terdiri dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh lembaga Balai Penyuluhan KB sebagai upaya pembangunan kesehatan masyarakat di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat diketahui pada fokus implementasi kebijakan yang dilakukan lembaga Balai Penyuluhan KB sesuai dengan teori Model Edward III yang terdiri dari bentuk komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara lebih

rinci pada proses komunikasi. Kemudian pada fokus pembangunan kesehatan masyarakat yang dilakukan lembaga Balai Penyuluhan KB juga sudah sesuai dengan teori H.L Blum yang terdiri dari faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan.

Secara rinci pada bentuk komunikasi dalam implementasi kebijakan menurut Rusdiana (2021) menjelaskan bahwa komunikasi adalah sebuah proses yang dilakukan dalam mentransmisikan informasi serta menginterpretasikan secara garis besar makna yang disampaikan secara efektif sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan hasil temuan peneliti lapang bahwa bentuk komunikasi sudah dilakukan dengan mentransmisikan isi kebijakan yang telah ditetapkan melalui kegiatan sosialisasi berupa promosi kesehatan tentang stunting kepada masyarakat secara langsung atau melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK). Kemudian proses transmisi kebijakan juga dilakukan melalui kegiatan pelatihan berupa pemberian pelajaran dan praktik (*give teaching and practice*) terkait aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) bagi calon pengantin.

Kemudian pada proses interpretasi kebijakan dalam komunikasi yang dilakukan lembaga tersebut kepada masyarakat juga sudah dilakukan dengan memberikan contoh terkait segala tindakan yang baik dilakukan untuk mencegah risiko stunting. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, adanya hal tersebut merupakan bentuk penerapan teori pembelajaran behavioristik karena dengan pemberian contoh terkait tindakan yang baik untuk mencegah stunting secara tidak langsung dapat merubah perilaku masyarakat sesuai dengan pengarahan yang telah diberikan. Adanya transmisi dan interpretasi dalam komunikasi yang dilakukan merupakan salah satu proses *transfer of learning* karena sebagai wujud pemindahan edukasi terkait stunting dari isi kebijakan yang digunakan kepada masyarakat (Widiastuti, R., & Faiza, R. (2022). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rasto dan Rego (2021) yang menyatakan bahwa *transfer of learning* merupakan sebuah kemampuan untuk menstransfer atau memindahkan pengetahuan yang telah diperoleh kepada masyarakat yang bersifat kompleks.

Selanjutnya berkaitan dengan sumber daya pada implementasi kebijakan menurut Dachi (2017) menyebutkan bahwa sumber daya dapat berupa adanya ketersediaan kecakapan untuk menyampaikan kebijakan secara efektif dan sumber daya berupa informasi, otoritas, serta fasilitas. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapang dapat diketahui bahwa adanya sumber daya berupa kecakapan informasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut di lembaga Penyuluhan KB ialah 3 orang penyuluh dan 20 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari kader KB, kader PKK, dan bidan desa. Kemudian pada bentuk informasi dapat diketahui adanya proses transmisi edukasi terkait stunting melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan lembaga Balai Penyuluhan KB kepada masyarakat. Sumber daya otoritas juga dapat dilihat adanya bentuk kekuasaan yang dimiliki seorang penyuluh sebagai penanggung jawab dan pelaksana kebijakan percepatan penurunan stunting di wilayah Kecamatan Sooko. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi adanya sumber daya fasilitas sudah dilakukan meskipun terdapat kekurangan dalam penerapannya pada proses implementasi kebijakan. Secara garis besar sumber daya fasilitas yang digunakan ialah paket data dari pemerintah, timbangan bayi digital, dan Pemberian Tambahan Makanan (PMT). Kemudian kekurangan yang dimiliki ialah tidak adanya fasilitas yang mendukung dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan.

Berkaitan dengan disposisi dalam komunikasi pada proses implementasi kebijakan menurut Amiruddin (2021) menyatakan bahwa disposisi merupakan sebuah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang implementor dalam proses implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa adanya watak serta karakteristik berupa sikap saling kerja sama serta adanya pendekatan keluarga yang dilakukan lembaga tersebut kepada masyarakat dapat mempermudah proses pembangunan kesehatan melalui implementasi kebijakan yang dilakukan.

Adapun struktur birokrasi pada proses implementasi kebijakan menurut Dachi (2017) terdapat SOP (*Standart Operating*

Procedures) yang dijadikan standar seorang pelaksana kebijakan dalam operasional yang bersifat kompleks. Sesuai dengan hasil temuan peneliti di lapang serta adanya hasil wawancara dapat diketahui bahwa terdapat SOP (*Standart Operating Procedures*) yang dibentuk oleh lembaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) pusat sebagai bentuk landasan serta standar bertindak bagi lembaga terkait salah satunya ialah lembaga Balai Penyuluhan KB untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat.

Kemudian pada fokus pembangunan kesehatan pada faktor lingkungan menurut Sartika dkk., (2022) menjelaskan bahwa pada lingkungan fisik kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas sanitasi di berbagai tempat individu berada saat itu. Sejalan dengan hasil temuan di lapang bahwa untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, lembaga Balai Penyuluhan KB memberikan sosialisasi berupa promosi kesehatan melalui penggunaan sanitasi air bersih dalam kehidupannya. Selanjutnya pada faktor perilaku dalam proses pembangunan kesehatan menurut Irwan (2020) menjelaskan bahwa perilaku merupakan tindakan berupa adat serta kebiasaan yang mempengaruhi tingkat kesehatan individu dalam masyarakat. Berdasarkan hasil temuan di lapang bahwa tindakan yang dilakukan lembaga Balai Penyuluhan KB untuk mempengaruhi perilaku masyarakat agar terhindar dari stunting sebagai bentuk pembangunan kesehatan adalah pemberian contoh perilaku hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan yang baik dan benar.

Berkaitan dengan faktor pelayanan kesehatan menurut Ummah dkk., (2021) menyebutkan berdasarkan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 52 Ayat 1 tentang kesehatan terdapat pelayanan kesehatan secara preventif, pelayanan kesehatan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap suatu penyakit atau masalah kesehatan. Sesuai dengan temuan peneliti di lapang bahwa tindakan yang dilakukan lembaga Balai Penyuluhan KB dalam implemenasi kebijakan pada proses pembangunan kesehatan ialah secara preventif, dimana lembaga tersebut melakukan pencegahan risiko stunting di wilayah Kecamatan Sooko melalui sosialisasi

KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) sebagai wujud promosi kesehatan bagi masyarakat agar selalu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting yang dilakukan lembaga Balai Penyuluhan KB sebagai upaya pembangunan kesehatan masyarakat di Kecamatan Sooko meliputi empat isu implementasi kebijakan dan tiga faktor pembangunan kesehatan. Empat isu dalam implementasi kebijakan tersebut terdiri dari bentuk komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adanya komunikasi yang dilakukan lembaga Balai Penyuluhan KB sudah dilakukan dengan baik yaitu melalui kegiatan sosialisasi berupa promosi kesehatan dan pelatihan berupa pemberian pelajaran dan praktik (*give teaching and practice*) terkait aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) kepada masyarakat secara langsung atau melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK). Kurangnya SDM dalam penyampaian informasi edukasi dan kurangnya keterampilan dalam pengoperasian aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan bagian kendala yang dialami lembaga Balai Penyuluhan KB dalam mengimplementasikan kebijakan.

Berkaitan dengan sumber daya pada proses implementasi kebijakan juga sudah dilakukan meskipun terdapat beberapa kekurangan. Dalam pelaksanaannya sumber daya terbagi menjadi dua yaitu sumber daya kecakapan informasi berupa 3 penyuluh dan 20 Tim Pendamping Keluarga (TPK) berupa kader KB, kader PKK, bidan desa. Kemudian sumber daya yang kedua berupa fasilitas yaitu paket data dari pemerintah, timbangan bayi digital, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Kekurangan yang dimiliki ialah tidak adanya fasilitas yang mendukung pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan.

Selanjutnya pada bagian disposisi sudah dilakukan dengan baik dengan adanya sikap dan karakteristik saling kerja sama serta melalui pendekatan keluarga untuk mempermudah proses pmbangunan kesehatan melalui implementasi kebijakan yang dilakukan. Pada bagian terakhir dalam

implementasi kebijakan terdapat struktur birokrasi yang digunakan untuk mempermudah Langkah serta sebagai landasan dalam bertindak ialah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibentuk oleh lembaga BKKBN pusat.

Pada proses pembangunan Kesehatan meliputi faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan Kesehatan juga sudah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi berupa promosi kesehatan dalam penggunaan sanitasi air bersih untuk menjaga kebersihan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan yang baik dan benar, serta edukasi kesehatan tentang pemanfaatan pelayanan kesehatan yang ada. Sikap acuh tak acuh serta kompleks dalam pengarahan serta penanaman edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu kendala yang dialami lembaga Balai Penyuluhan KB pada proses pembangunan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Dachi, R. A. 2017. *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan. Cetakan pertama*. Yogyakarta : Deepublish.
- Dwinandia, M. M., & Hilmi, M. I. (2022). Strategi Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dalam Optimalisasi Fungsi Edukasi Keluarga. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 5(2), 74-80.
- Hamzah, A. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan 1. Malang : CV Literasi Nusantara Abadi.
- Irwan. 2020. *Etika dan Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta : CV. Absolute Media.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021. *PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021. Nomor 172. Jakarta.
- Rusdiana. 2021. *Etika Komunikasi Organisasi : Filosofi Konsep dan aplikasi*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD.
- Sartika dkk. 2022. *Ilmu Kesehatan Masyarakat. Bandung* : CV Media Sains Indonesia
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi Kesatu. Bandung : Alfabeta.
- Ummah, F, dkk. 2021. *Pendidikan Kesehatan dan Promosi Kesehatan*. Bandung : CV. Media Sains Indonesia
- Widiastuti, R., & Faiza, R. (2022). Upaya Kader Posyandu dalam Mengurangi Tingkat Stunting di Desa Pakel Kabupaten Jombang. *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(2), 130-137. doi:10.19184/jlc.v6i2.34393.
- Yuliana, W. dan B. N. Hakim. 2019. *Darurat Stunting Melibatkan keluarga*. Cetakan Pertama. Takalar : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.